



Kebutuhan Transportasi Publik Belum Terpenuhi

● SILVY DIAN SETIAWAN

Kota Yogyakarta dinilai belum dapat menyediakan transportasi publik yang memadai bagi masyarakatnya. Walaupun sudah ada transportasi publik seperti TransJogja, namun hal itu belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan maksimal.

"Transportasi publik harus perlu ditingkatkan. Saya melihat, halte-halte yang ada di Trans Jogja itu belum memenuhi syarat. Itu yang menyebabkan orang tidak beralih ke sana," kata pengamat tata kota dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Ikaputra, kepada *Republika*, Ahad (10/11).

Ia mengatakan, dengan kurangnya penyediaan layanan transportasi publik, tentu masyarakat masih menggunakan kendaraan umum. Hal ini tentunya mengakibatkan banyaknya penggunaan kendaraan pribadi dibanding transportasi publik.

Sehingga, berdampak kepada lahan parkir yang disediakan tidak mencukupi untuk kendaraan pribadi. Dengan begitu, parkir liar pun bertebaran seperti yang terjadi di beberapa ruas jalan di Kota Yogyakarta.

Ia menjelaskan, kekurangan Trans-

Jogja yakni ada pada jarak halte ke halte lainnya yang cukup jauh. Padahal, halte untuk transportasi publik harusnya dengan jarak 800 meter hingga satu kilometer. "Kalau saya ada di tengah (antara kedua halte), berarti saya hanya perlu jalan kaki 400 atau 500 meter. Kalau itu nyaman, saya tinggal milih (menggunakan TransJogja)," jelasnya.

Dengan maksimalnya penyediaan transportasi publik, tidak hanya parkir liar yang akan teratasi. Namun, masyarakat akan membudayakan jalan kaki dan tentunya beralih dari kendaraan pribadi.

"Mobilitas yang baik dari masyarakat itu harusnya bertumpu pada transportasi publik. Karena transportasi publik hubungannya adalah sama jalur pedestrian dan mengurangi kebutuhan parkir. Ini semua berkaitan," jelasnya.

Dengan begitu, transportasi publik di Yogyakarta perlu untuk terus ditingkatkan. Hal ini guna mendukung mobilitas masyarakat menggunakan transportasi publik. "Kenapa masih ada parkir liar, itu karena kebutuhan parkir kendaraan pribadi masih ada di situ, karena transportasi publik yang belum bertambah baik," katanya.

Sehingga, berbagai persoalan di

Yogyakarta seperti parkir liar dan tidak nyamannya jalur pedestrian untuk pejalan kaki dapat dikurangi. Bahkan, sebagai tujuan wisata, Yogyakarta akan lebih ramah terhadap wisatawan.

Pemerintah Kota Yogyakarta sudah mulai memperbaiki berbagai jalur pedestrian untuk memanjakan pejalan kaki. Salah satu contohnya di kawasan Malioboro, yang juga menjadi referensi bagi daerah lain di Indonesia.

Yang mana, seluruh kawasannya dijadikan sebagai jalur pedestrian. Untuk itu, kawasan lainnya di Yogyakarta juga harus ramah bagi pejalan kaki. Dengan begitu, kata Ikaputra, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar jalur pedestrian. Sebab, hal ini merupakan kunci untuk menjadikan kota yang sukses.

"Sebenarnya tidak harus di Malioboro saja, semua yang berkaitan dengan publik seperti halte, hal yang berkaitan dengan tempat turun, kalau (ada akses untuk) jalan kaki itu pasti akan lebih produktif. Artinya ekonominya meningkat. Sekarang yang terjadi, meningkat hanya tempat parkir liar. Yang dapat uang dari parkir liar hanya tukang parkirnya tidak pada lahannya," jelas Ikaputra. ■ ed: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 17 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005